

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya ***Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.***

Pada dasarnya Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Lingkungan Hidup sejak terbentuk pada tanggal 10 Januari 2020 sampai sekarang (triwulan II).

Namun sebagai salah satu bagian dari sistem perencanaan daerah, maka Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup juga menggambarkan perencanaan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sejalan dengan RPJMD Kab. Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana kerja tahunan yang dibuat untuk menunjang Visi dan Misi Dinas khususnya dan Kabupaten Sidenreng Rappang Umumnya. Renja ini pula nantinya yang terangkum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidrap dan menjadi acuan setiap sektor/bidang lingkup Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2023.

Semoga dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ini, seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkajene Sidenreng, 17 Juli 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip 19690507 199903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	01
I.1 LATAR BELAKANG	01
I.2 LANDASAN HUKUM	02
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	04
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN	04
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	07
II.1 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	07
II.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	28
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
III.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	29
BAB IV PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan disusun sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan untuk koordinasi antar pelaku, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang.

Perencanaan yang strategis diperlukan dalam menetapkan program maupun kegiatan yang akan direalisasikan di tahun ini. Rencana Kerja (Renja) disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam memasukkan program/kegiatan ke dalam KUA dan PPAS. Renja juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Perubahan atas rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya di latar belakang oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dan perubahan ini juga turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan suatu kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan hukum agar kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun alasan hukum dalam penyusunan perubahan renja adalah:

- a) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir =dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- h) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- i) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
- j) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- k) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas.
- l) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor XX Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan rencana kerja di tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan adanya perubahan dari rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari segi program, kegiatan maupun target kinerjanya, Sehingga tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup bisa terealisasi dengan optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Urusan /bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dengan format tabel III.1.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup ini menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2023 terdiri dari 3 Program, 5 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar **Rp. 13.398.232.000,-** dengan rincian belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.606.928.000,-** belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 8.600.984.900,-** dan belanja modal **Rp. 1.735.746.100,-**

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terdiri :

1. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 50%.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 25%.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 20%.

- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 20%
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 35%
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 40%
- 7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0,25%
- 8) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- 9) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 40%
- 10) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- 11) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0,32%
- 12) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan target 100% yang terealisasi 25%

- 13) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 24%
- 14) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 30%
- 15) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dengan kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan target 100% yang terealisasi 45%
- 16) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- 17) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan target 60% yang terealisasi 48%
- 18) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan target 72% yang terealisasi 45%

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:

Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Keegiatanyang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dirancakan sampai triwulan II belum ada.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:

- 1) Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatanannya.
- 2) Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
- 3) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
- 4) Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

5. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 yaitu :

- a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
- b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu:

- a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
- b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
- c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
- d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Adapun pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

Tabel II.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja capaian program (Renstra Pertangkat Daerah) s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Targer Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkatt Daerah	Realisaii Renja Perangkatt Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7)	10=9/4*100)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	1 1								
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				

2	1 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	50	50	100	100
2	1 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan yang di hasilkan	100	100	100	50	50	100	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	3	3	1	0.3	4	44
2	1 1	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3	3	1	1	1	4	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6	2	2	1	0,5	3	100

2	1 1	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	1	1	1	1	2	33.3
2	1 1	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	2	2	0	0	2	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	5	5	1	0,2	6	40
2	1 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Administrasi Keuangan	100	100	100	25	25	100	100

2	1 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2800	12	14	3	0,53	15	233
2	1 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	7	1	0	0	7	233
2	1 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	13	20	5	0,25	18	30
2	1 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	20	20	100	100

2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	453	151	151	9	0,05960265	160	714
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar Daerah	600	135	200	30	0,58	165	314
2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100	100	20	20	100	100
2	1	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30		10	0	0	0	0
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	35	35	100	100
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1050		350	50	0,143	100	28,57
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	3	0,25	15	41

2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	3	0,25	15	41
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	40	40	100	100
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	12	100	0	0	12	12
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	53	100	0	0	53	143

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	1	100	0	0	1	1
2	1 1	0 1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	24	100	0	0	24	24
2	1 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	100	100	0,25	0,25	100	100
2	1 1	0 2	2.0 1		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH	100	100	100	0,25	0,25	100	100
2	1 1	0 2	2.0 1	0 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2	1	2	0	0	1	50

2	1 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	100	40	100	40	40	80	100
2	1 1	0 3	2.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	100	40	40	100	100
					Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	1	2	0	0	1	16.6
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tercapainya indeks kualitas air	6		2	0	0	1	50
2	1 1	0 3	2.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100	100	100	0	0	100	100

2	1 1	0 3	2.0 2	0 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3	2	1	0	0	2	66
2	1 1	0 3	2.0 2	0 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	6	0	1	0	0	0	181,2
2	1 1	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	20	18	18,19	0,32	1,76	18,32	100
2	1 1	0 4	2.0 1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	100	100	0,32	0,32	100	100
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24	1	8	11,75	147	12,75	42,2
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3	0	1	0	0	0	0

2	1 1	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	100	100	30	49	100	100	100
2	1 1	0 5	2.0 1		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	100	100	0,25	25	100	100	100
2	1 1	0 5	2.0 1	0 1	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15	4	5	0	0	4	26

2	1 1	0 5	2.0 1		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah	100	100	100	24	24	100	100
2	1 1	0 5	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	15		5	3	0,6	3	20

2	1 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	100	30	30	100	100
	1 1	0 6	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin	100	100	100	30	30	100	100
2	1 1	0 6	2.0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	56		24	0	0	0	0

2	1 1	0 6	2.0 1	0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150	36	50	11	0,31	47	1,31
2	1 1				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100	100	100	45	45	100	100
2	1 1	0 7	2.0 1		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	100	100	45	45	100	100

2	1 1	0 7	2.0 1	0 1	Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	3	0	1	0	0	0	0
2	1 1	0 9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100	200	100
2	1 1	0 9	2.0 1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup	100	100	100	0	0	100	100
2	1 1	0 9	2.0 1	0 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang	48	16	5	0	0	100	50

					Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolan Lingkungan Hidup	Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH								
2	1 1	1 0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	48	48	100	100	
2	1 1	1 0	2.0 1		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	60	48	80	100	100	
2	1 1	1 0	2.0 1	0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	15	0	10	7	0,7	7	46	
2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peresentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota	100	70	73	45	61,64	100	100	

2	1 1	1 1	2.0 1		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100	100	72	45	62,5	100	100
2	1 1	1 1	2.0 1	0 2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	24	0	1	6	0,67	6	33,3
2	1 1	1 1	2.0 1	0 3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	74	0	24	0	0	0	0,22
2	1 1	1 1	2.0 1	0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4	3	0	0	0	3	75

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Partisipasi/minat atau kesadaran masyarakat rendah akan pentingnya kebersihan lingkungan
2. Kapasitas TPA sudah over
3. Terjadi Hambatan Aliran Air Buangan pada Saluran Drainase Sampah, Gulma dan Sedimen yang menghambat aliran air buangan sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat
4. Sosialisasi tentang kriteria penilaian adipura
5. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam program penanaman pohon
6. Kurangnya tokoh masyarakat yang mengetahui hukum adat dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
7. Penguatan Kelembagaan Berbasis Lingkungan Hidup (ADIWIYATA)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk tahun 2023 program dan kegiatan berdasarkan pada RPJMD Perubahan 2019-2023 dan Rencana Kerja serta Pendanaan Daerah Tahun Anggaran 2023 di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel III.I adalah sebagai berikut:

1. Program Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- e. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- j. Program Pengelolaan Persampahan

2. Kegiatan

Untuk menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Lingkungan Hidup merencanakan kegiatan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - b) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - b) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - b) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 2) Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

- 1) Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - a) Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

j. Program Pengelolaan Persampahan

- 1) Pengelolaan Sampah
 - a) Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - b) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Tabel III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

2	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100%	4.504.625.6 00			100%	4.562.500.6 00	
2	1	0	2.		Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan yang di hasilkan		100%	51.770.100			100%	48.259.100	ASN Dinas Lingkunga n Hidup
2	1	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	4 Dokumen	20.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	4 Dokumen	20.000.000	

2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.500.000	
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	

2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	4.270.100	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	4.270.100	
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	20.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	16.489.000	
2	1	0	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Administrasi Keuangan		100%	3.638.923.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	3.638.923.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup

2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	560 Orang/Bulan	3.606.928.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	560 Orang/Bulan	3.606.928.000	
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8.359.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8.359.500	

2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	23.636.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	23.636.000	
2	1	0	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	215.502.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	215.502.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	3.402.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	3.402.000	

2	1	0	2.	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar Daerah	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	212.100.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	212.100.000	
2	1	0	2.	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	21.125.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	61.386.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	21.125.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	61.386.000	
2	1	0	2.	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	394.360.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	394.360.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup

2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Laporan	5.000.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Laporan	5.000.000	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	74.040.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	74.040.000	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	315.320.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	315.320.000	

2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	204.070.000			100%	204.070.000	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	42.400.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	42.400.000	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Unit	130.203.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 Unit	130.203.000	

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	15.000.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	15.000.000	
2	1	0	2.	1		Pemeliharaan alat dan mesin lainnya		Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	16.467.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	16.467.000	
2	1	0				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		100%	115.725.000	Masyarakat		100%	615.725.000	Masyarakat

2	1	0	2.		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH		100%	115.725.000			100 Persen	115.725.000	
2	1	0	2.	0	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	115.725.000			1 Dokumen	115.725.000	
2	1	0	2.		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraa n KLHS		100%	170.000.000			100 Persen	500.000.000	
	1	0	2.	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	170.000.000			1 Dokumen	170.000.000	

2	1	0	2.	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	330.000.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	330.000.000	
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		60%	122.959.600			60%	90.709.600	
2	1	0	2.	0	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		100%	80.000.000			100%	48.594.000	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua	2 Dokumen	20.000.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	2 Dokumen	20.000.000	

						Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kelurahan				Kelurahan		
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tercapainya indeks kualitas air	Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	60.000.000		2 Kali/Pengujian	28.594.000
2	1	0	2.			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		100%	42.959.600		100%	42.115.600

2	1	0	2.	0	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 laporan	20.000.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Laporan	21.612.500	
2	1	0	2.	0	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Titik	22.959.600		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Titik	20.503.100	
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan		20%	1.484.781.600			20%	1.484.781.600	

2	1	0	2.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		100%	1.484.781.600			100%	1.484.781.600	
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Ha	1.462.712.100		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Ha	1.462.712.100	
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Lokasi	22.069.500		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi	22.069.500	

2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 Persen	30.000.100			88 Persen	30.000.100	
2	1	0	2.		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5.000.100			100%	5.000.100	

2	1	0	2.	0	0	1	1	5	1	1	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	5.000.100		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	5.000.100	
2	1	0	2.	0	0	1	1	5	1	1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah		100%	25.000.000	Usaha/Kegiatan		100%	25.000.000	Usaha/Kegiatan

2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		100%	45.000.000			100%	45.000.000	
2	1	0	2.		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin		100%	45.000.000	Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan		100%	45.000.000	Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan

2	1	0	2.	0	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	20.000.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	20.000.000	
2	1	0	2.	0	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Laporan	25.000.000			35 Laporan	25.000.000	

2	1	0				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	100%	15.000.000			100%	15.000.000	
2	1	0	2.			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		100%	15.000.000	Masyarakat		100%	15.000.000	Masyarakat

2	1	0	2.	0	Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	
2	1	0			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup		100%	74.937.500			100%	74.937.500	

2	1	0	2.		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup		100%	74.937.500			100%	74.937.500	
2	1	0	2.	0	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Entitas	74.937.500		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Entitas	74.937.500	
2	1	1			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti		60%	25.000.000			60%	25.000.000	

2	1	1	2.		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		100%	25.000.000	Masyarakat	100%	25.000.000	Masyarakat
2	1	1	2.	0	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	25.000.000		10 Dokumen	25.000.000	
2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani		72,50%	7.034.077.600		72,50%	7.029.577.600	

2	1	1	2.		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah		100%	7.034.077.600			100%	7.029.577.600	
2	1	1	2.	0	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan	1.695.390.700		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.529 Ton	1.676.259.700	
2	1	1	2.	0	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.410 Ton	3.673.992.900		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.410 Ton	3.688.623.900	

2	1	1	2.	0	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab.Side nreng Rappang , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	1.664.694.000		Kab.Side nreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	1.664.694.000	
---	---	---	----	---	---	--	---	---	---------	---------------	--	--	--------	---------------	--

BAB IV P E N U T U P

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2023 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Perubahan rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan bidang Lingkungan Hidup sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang. Adapun rencana kerja ini apabila masih ada kekurangan maka saran dan masukan dari semua pihak senantiasa kami harapkan.

Pangkajene Sidenreng, 17 Juli 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip 19690507 199903 1 010